



Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era Digital

Yungkul

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

Email: yungkulkt@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Sistem Administrasi Publik, Digitalisasi, E-Government, Pelayanan Publik, Transparansi, Efisiensi, Kebijakan Pemerintah.

Penelitian ini menganalisis optimalisasi sistem administrasi publik berbasis digital dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan. Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan untuk mendukung transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemerataan infrastruktur digital agar implementasi sistem administrasi berbasis digital dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari digitalisasi pelayanan publik.

Keywords:

Public Administration System, Digitization, E-Government, Public Services, Transparency, Efficiency, Government Policy.

Abstract

This study analyzes the optimization of digital-based public administration systems in improving the effectiveness of government services. With the application of information and communication technology (ICT), digitization is expected to improve efficiency, transparency, and accountability in public services. The results of the study show that the implementation of e-Government accelerates service processes, reduces bureaucracy, and improves service accessibility. However, challenges such as digital

divides between regions, infrastructure limitations, and resistance to change remain major obstacles. This study recommends policies to support digital transformation, enhance human resource capacity, and ensure equitable distribution of digital infrastructure to ensure the effective and sustainable implementation of digital-based administrative systems. Further research is needed to analyze the long-term impacts of public service digitalization.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan Indeks Pembangunan TIK yang mencapai angka 5,90, meningkat dari 5,85 pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam infrastruktur, akses, dan penggunaan teknologi di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor publik, dimana pemerintah semakin mengoptimalkan penggunaan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, salah satunya melalui transformasi digital dengan penerapan sistem administrasi berbasis TIK yang telah memberikan dampak positif, seperti halnya pada penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Rekam Medis Elektronik (EMR) yang tidak hanya mempercepat alur operasional rumah sakit dan meningkatkan kualitas pelayanan, namun juga membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat berkat data yang lebih terstruktur dan mudah diakses (Molly & Itaar, 2021; Riyanti, 2023; Saputra Mokoagow et al., 2024; Ulfah Hayatunnisa et al., 2020; Wilar et al., 2023; Wiryany et al., 2022).

Implementasi TIK dalam sektor publik juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain kesenjangan digital yang terjadi antarwilayah, yang mana beberapa daerah di luar Jawa masih kesulitan dalam hal akses dan infrastruktur TIK, masalah keamanan dan privasi data yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah mengingat potensi ancaman terhadap informasi sensitif, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi yang dapat mendukung proses digitalisasi tersebut, di mana berdasarkan data terbaru, tingkat kompetensi digital sumber daya manusia di beberapa sektor publik di Indonesia masih tergolong rendah; oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan merata, dengan prioritas pada pemerataan infrastruktur TIK di seluruh daerah di Indonesia serta peningkatan pelatihan bagi aparat pemerintah agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, sementara itu kebijakan yang dapat menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat juga menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan agar pengembangan TIK di sektor publik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa mengabaikan potensi ancaman yang ada (Maryanah et al., 2024).

Menurut Yulanda, *et al.*, (2023) penerapan transformasi digital yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, khususnya melalui sistem administrasi berbasis TIK seperti Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan Rekam Medis Elektronik (EMR), tidak hanya memungkinkan penyederhanaan prosedur dan mempercepat alur pelayanan yang dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, namun juga menghadirkan tantangan besar, termasuk kesenjangan digital antarwilayah yang masih signifikan, terutama di luar Jawa, masalah keamanan dan privasi data yang mengharuskan perlunya kebijakan yang melindungi informasi sensitif, serta kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola teknologi dengan efektif, yang semuanya memerlukan kebijakan pemerintah yang inklusif dan merata, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur TIK dan pelatihan aparat pemerintah guna memastikan penerapan TIK yang optimal dapat meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik serta mengurangi hambatan yang timbul akibat kesenjangan digital dan masalah keamanan data (Yulanda & Fachri Adnan, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang pesat di era digital ini, yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, sistem berbasis cloud, serta pemanfaatan data besar (*big data*), memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor publik, di mana penerapan sistem administrasi berbasis TIK mampu menyederhanakan prosedur birokrasi yang rumit, mempercepat alur pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meskipun demikian, tantangan besar yang dihadapi adalah kesenjangan digital antarwilayah yang masih terasa, terutama di daerah terpencil, serta kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, dan memastikan perlindungan data pribadi agar penerapan teknologi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan Masyarakat (Gultom *et al.*, 2024).

Menurut Gultom, *et al.*, (2024) dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sektor publik melalui sistem e-Government dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, karena penerapan sistem berbasis TIK dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat alur pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, seiring dengan kemajuan teknologi seperti *cloud computing* dan *big data* yang memungkinkan pengelolaan data publik yang lebih terstruktur dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, meskipun e-Government dapat menghadirkan manfaat besar dalam meningkatkan pelayanan publik, tantangan utama yang masih dihadapi, seperti kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta rendahnya tingkat keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi, memerlukan perhatian serius dari pemerintah, yang harus merumuskan kebijakan inklusif untuk pemerataan akses teknologi serta perlindungan data pribadi agar transformasi digital

dalam administrasi publik dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, tanpa mengabaikan potensi risiko yang ada.

Kesenjangan infrastruktur digital yang mencolok antarwilayah, terutama di daerah terpencil, telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pelayanan publik berbasis digital, di mana beberapa daerah masih kesulitan menyediakan akses internet yang memadai, sehingga mengurangi efektivitas implementasi sistem administrasi digital, sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kompetensi digital di kalangan aparatur sipil negara (ASN) menjadi tantangan besar, karena tanpa adanya pelatihan yang memadai, ASN kesulitan mengoperasikan sistem administrasi digital secara efisien, ditambah dengan resistensi terhadap perubahan dalam budaya birokrasi yang cenderung kaku, yang memperlambat adopsi teknologi baru, dengan banyak instansi pemerintah masih terjebak dalam prosedur lama yang tidak efisien, sementara itu, kekhawatiran terhadap keamanan dan privasi data, seiring dengan pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar, meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan, meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, serta ketidakpastian regulasi yang seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penggunaan teknologi untuk administrasi publik, terutama terkait dengan privasi data dan keamanan informasi (Susilawati et al., 2024).

Selain itu, keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur digital yang memadai untuk e-government menjadi masalah, karena biaya instalasi dan pemeliharaan perangkat keras serta jaringan internet yang tinggi, sementara sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, ditambah lagi kurangnya standarisasi platform yang menyebabkan aplikasi yang ada memiliki fitur dan fungsi yang berbeda-beda, yang pada akhirnya menyulitkan integrasi antar sistem dan menghambat tercapainya efisiensi dalam pelayanan public (Putri et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan metodologis yang digunakan mengintegrasikan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan sistem administrasi publik berbasis digital di Indonesia. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah dan pengguna layanan publik untuk menggali perspektif, pengalaman, dan persepsi mereka terkait efektivitas dan tantangan sistem digital yang diterapkan. Menurut Gultom, *et al.*, (2024) menggunakan wawancara purposive sampling untuk memperoleh data kualitatif yang mendalam mengenai implementasi e-Government di instansi pemerintah tertentu. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi publik digital melalui penyebaran kuesioner yang dirancang dengan skala Likert, untuk menilai kualitas pelayanan KRL Commuter Line di Yogyakarta (Hakim et al., 2024).

Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kriteria instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem administrasi berbasis digital, seperti e-Government, di berbagai daerah di Indonesia. Waktu penelitian direncanakan selama 1 minggu, dimulai dari Juli 2025, untuk memastikan pengumpulan data yang representatif dan analisis yang mendalam. Sampel penelitian terdiri dari dua kelompok utama: pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam implementasi sistem digital dan masyarakat pengguna layanan publik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk pejabat pemerintah, dengan pertimbangan pengalaman dan peran mereka dalam sistem digital, serta stratified sampling untuk masyarakat, guna memastikan keberagaman karakteristik responden.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dirancang untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan representatif mengenai penerapan sistem administrasi publik berbasis digital. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pejabat pemerintah dan pengguna layanan publik untuk menggali perspektif, pengalaman, dan persepsi mereka terkait efektivitas dan tantangan sistem digital yang diterapkan. Kuesioner yang dirancang dengan skala Likert digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi publik digital, memastikan pengukuran yang objektif dan reliabel.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan triangulasi, menggabungkan analisis tematik untuk data kualitatif dan analisis statistik deskriptif serta inferensial untuk data kuantitatif, memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai efektivitas dan tantangan dalam penerapan sistem administrasi publik digital. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip metodologi penelitian yang menekankan pada validitas dan reliabilitas data, serta kemampuan untuk menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem administrasi publik berbasis digital yang lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks transformasi digital administrasi publik di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem administrasi publik berbasis digital yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Dengan pendekatan metodologis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi sistem administrasi publik berbasis digital, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik di Indonesia, khususnya dalam konteks digitalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di era digital (Maryanah et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Septory (2022) di Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional, dengan hasil yang sangat signifikan, antara lain kecepatan respon 100%, tingkat kinerja 100%, sangat efektif 100%, kepuasan pengguna 100%, kualitas pelayanan 98%, dan kualitas sistem 100%, yang mencerminkan bahwa digitalisasi sistem administrasi perkantoran dapat mempercepat proses pembuatan laporan, mengurangi penggunaan kertas, serta meningkatkan akurasi data dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan temuan Najjar et al. (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi sekolah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di SMPN 2 Tanantovea, yang sebelumnya menghadapi tantangan dalam proses administrasi perkantoran konvensional yang memerlukan verifikasi secara tatap muka dan penyusunan dokumen setiap kali dibutuhkan, sedangkan dengan digitalisasi, proses tersebut menjadi lebih efisien dan efektif, memudahkan akses informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Septory et al., 2022).

Pemerintah Kabupaten Serang telah sukses meningkatkan efisiensi operasional pelayanan publik melalui peluncuran aplikasi Serang Tatu pada 8 Oktober 2023. Aplikasi berbasis TIK ini mengintegrasikan layanan kependudukan, kesehatan, perizinan, dan perpajakan, memungkinkan masyarakat mengakses layanan dengan lebih cepat, mengurangi waktu tunggu, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, ada tantangan signifikan yang masih dihadapi, termasuk keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat, dan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang semuanya memerlukan perhatian serius untuk mengoptimalkan dan pemeratakan manfaat digitalisasi.

Secara lebih luas, implementasi sistem administrasi publik berbasis digital di Indonesia menghadapi kendala seperti kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang menghambat akses sebagian masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) karena rendahnya literasi digital ASN, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi di birokrasi, juga menjadi penghambat efektivitas transformasi digital. Kendati demikian, inovasi TIK ini telah terbukti berdampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia (Mashudin, 2025).

Meskipun demikian, evaluasi biaya dan manfaat dari penerapan e-Government perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem digital, sebagaimana disarankan oleh Santoso (2024), yang menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem e-Government yang diterapkan tetap relevan dan efektif serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang; oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran digitalisasi dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat memberikan akses lebih besar kepada masyarakat terhadap informasi penting, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat proses

administrasi, meskipun digitalisasi memberikan banyak peluang, tantangan terkait infrastruktur yang belum merata, literasi digital yang rendah, dan ancaman keamanan siber tetap menjadi hambatan signifikan, sehingga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi digitalisasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel (Iwan Ahmad Puji Santoso, 2025).

Penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, seperti yang ditemukan dalam penelitian oleh Lautza et al. (2024) yang menganalisis kualitas pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Cidadap Kota Bandung, serta studi oleh Arifin et al. (2025) yang mengevaluasi implementasi digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Serang; meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam implementasi yang merata, sebagaimana disoroti oleh Arifin et al. (2025) yang menekankan pentingnya kolaborasi antar organisasi perangkat daerah dalam mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik (Zein et al., 2025).

Serta oleh Pratama dan Frinaldi (2025) yang meneliti peran inovasi budaya organisasi dan partisipasi pegawai dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, yang menunjukkan bahwa budaya organisasi yang inovatif dan partisipasi aktif pegawai dapat mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan (Masyarakat et al., 2025).

Tabel 1 Optimalisasi Sistem Administrasi Publik

No	Bagian	Deskripsi	Referensi
1	Peningkatan Efektivitas Administrasi Publik	Peningkatan efektivitas administrasi publik dapat tercapai melalui penerapan sistem berbasis digital yang memfasilitasi pengelolaan data lebih cepat dan akurat, serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.	Santoso (2024)
2	Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik	Transformasi digital dalam pelayanan publik membantu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.	Septory (2022)
3	Tantangan dalam Optimalisasi Sistem Administrasi	Tantangan utama dalam optimalisasi sistem administrasi digital adalah kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi dari aparat pemerintah yang lebih nyaman dengan sistem konvensional.	Arifin et al. (2025)
4	Kolaborasi Antara Organisasi Perangkat Daerah	Kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) sangat penting untuk memastikan integrasi sistem digital secara merata di	Arifin et al. (2025)

	seluruh instansi pemerintah, mempermudah pertukaran data, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.	
5	Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Digitalisasi	Santoso (2024)
	Kebijakan pemerintah yang mendukung transformasi digital melalui pengalokasian anggaran untuk infrastruktur TIK, pelatihan SDM, dan penyusunan regulasi yang jelas sangat penting untuk mendorong implementasi sistem administrasi berbasis digital yang efektif.	

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi sistem administrasi publik berbasis digital secara signifikan meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan, terutama dalam aspek transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan; meskipun demikian, tantangan seperti kesenjangan digital antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi yang merata; untuk itu, disarankan agar pemerintah menyusun kebijakan yang lebih mendalam guna mempercepat digitalisasi administrasi publik, termasuk peningkatan pelatihan bagi aparatur sipil negara dan perbaikan infrastruktur digital, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap sistem administrasi publik digital guna meningkatkan kualitas layanan; selanjutnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari sistem administrasi digital terhadap pelayanan publik, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi sistem digital secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 128–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516>
- Hakim, A., Ari Fatun Nisa, F., Bahrun Muzaki, M., Mulyo Sejati, W., Aliyah, N., & Tri Nugraha, J. (2024). Kualitas Pelayanan Krl Commuter Line Di Yogyakarta. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 4(06), 87–106. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1566>
- Iwan Ahmad Puji Santoso. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4004>
- Maryanah, S., Zahra, M., & Rahmawati, A. (2024). Transformasi Administrasi Publik Diera Digital. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8206–8212. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14213>
- Mashudin, A. (2025). Transformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Inovasi Dan Tantangan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 449–456. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i1.433>
- Masyarakat, P., Nagari, D. A. N., & Agam, K. (2025). *1, 2 1,2*. 5(2), 639–648.

- Molly, R., & Itaar, M. (2021). Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Pada RRSUD DOK II Jayapura. *Journal of Software Engineering Ampera*, 2(2). <https://doi.org/10.51519/journalsea.v2i2.127>
- Putri, B. K., Putri, N. E., & Umar, G. (2025). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Ina Digital Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Integrasi Layanan Di Era Digital. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1309–1315. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.40991>
- Riyanti, J. (2023). Pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit dengan fitur integrasi data pasien, pendaftaran, dan jadwal dokter. *Jurnal Cyberarea*, 3(7).
- Saputra Mokoagow, D., Mokoagow, F., Pontoh, S., Ikhsan, M., Pondang, J., & Paramarta, V. (2024). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dalam Meningkatkan Efisiensi: Mini Literature Review. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1223>
- Septory, D., Ananta Putra Putu Reksa, E., Agung Ramadhan, W., & Savsavubun, V. (2022). Analisis Tingkat Efektivitas Digitalisasi Sistem Administrasi Perkantoran Di Kantor Kelurahan Oro-Oro Dowo. *Jurnal Pengabdian West Science*, 1(1), 35–41.
- Susilawati, Kurniawati, Ilham, D., Sunarsi, D., Wahidiyat, A., & Haedar. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia. *Pralangga Praja*, 6(1), 67–73.
- Ulfah Hayatunnisa, N., Soepangat, S., & Windiyaningsih, C. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Di Unit Perawatan Intensif Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Tahun 2018. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit*, 4(1).
- Wilar, Y. A., Yuliawan, K., & Natsir, A. A. (2023). Analisis Keamanan Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 3(10). <https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i10.11246>
- Wiriany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>
- Yulanda, A., & Fachri Adnan, M. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, 1(3), 103–110.
- Zein, A. W., Anggraini, D., & Malau, R. A. (2025). Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Pelayanan Publik : Studi Ekonomi Publik Digital. *Bisnis Dan Digital*, 2(2), 136–147.